

BAB 2

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Perkembangan manajemen transportasi di wilayah Tangerang Selatan tidak lepas dari sejarah panjang berdirinya Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan. Instansi ini secara konsisten melakukan adaptasi struktural dan operasional demi menjawab tantangan era digital serta dinamika kebutuhan mobilitas masyarakat setempat.



Gambar 2.1. Logo Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan (Sumber: <https://dishub.tangerangselatankota.go.id/>)

Secara historis, instansi perhubungan di Indonesia telah terbentuk sejak awal periode kemerdekaan nasional. Awal mulanya, pengelolaan sektor perhubungan disatukan dengan sektor pekerjaan umum dalam satu wadah Departemen Perhubungan. Seiring berjalannya roda pemerintahan, pemisahan dilakukan untuk membagi fokus bidang sehingga terbentuklah Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum secara mandiri. Pada perkembangannya, Departemen Perhubungan secara spesifik diamanahkan untuk mengatur dan mengawasi aspek logistik serta transportasi darat, laut, udara, termasuk urusan pos dan telekomunikasi [7].

Peran sektor perhubungan juga sangat krusial pada masa pergolakan politik nasional, khususnya saat terjadi agresi militer Belanda kedua pada tahun 1948. Dalam situasi kritis tersebut, Dinas Telegraf yang merupakan bagian dari jawatan Departemen Perhubungan berhasil mentransmisikan kawat penting dari Presiden Soekarno kepada Mr. Sjafruddin Prawiranegara di Bukittinggi. Kawat darurat tersebut menjadi dasar hukum mandat pembentukan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang dipimpin oleh Mr. Sjafruddin selaku Perdana Menteri, dengan Ir. Indratjaja ditunjuk sebagai Menteri Perhubungan [8].

Sejalan dengan pergantian kabinet dan dinamika politik, struktur serta tata nama kementerian ini mengalami serangkaian modifikasi. Hal ini dibuktikan dengan dibentuknya Departemen Perhubungan Laut di era Kabinet Djuanda hingga penyesuaian nomenklatur menjadi Kementerian Perhubungan pada masa Demokrasi Terpimpin. Di era modern, Kementerian Perhubungan mengemban otoritas penuh dalam merancang kebijakan serta tata kelola sistem transportasi nasional yang terbagi atas sektor darat, laut, udara, serta moda perkeretaapian [9].

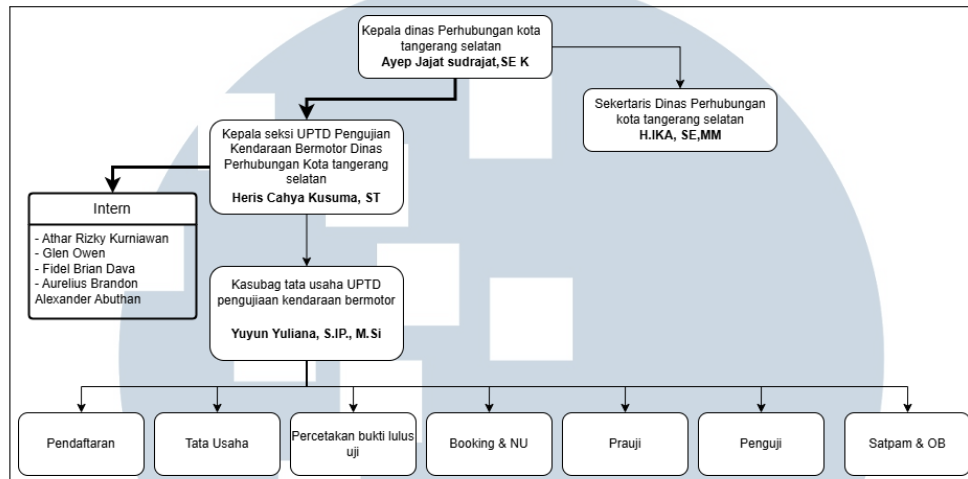
2.2 Visi Misi Perusahaan

Rumusan visi dari Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan berfokus pada perwujudan sistem transportasi daerah yang terintegrasi secara modular, berkelanjutan, serta ditopang oleh implementasi teknologi modern guna mengakomodasi pembangunan wilayah yang progresif dan saling terhubung.

Dalam merealisasikan visi tersebut, instansi menetapkan sejumlah misi strategis, di antaranya:

1. Membangun dan memelihara sarana prasarana perhubungan yang mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan pengguna, serta kelestarian ekologi lingkungan.
2. Mengoptimalkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan mengadopsi solusi teknologi informasi terapan, seperti pengoperasian sistem pemesanan elektronik *BOOKIR (Booking KIR)*.
3. Menjalin kemitraan yang sinergis antara pihak swasta, instansi terkait, dan elemen masyarakat dalam upaya pembangunan sistem transportasi perkotaan.

2.3 Struktur Organisasi Perusahaan



Gambar 2.2. Struktur organisasi UPTD Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan (Sumber: Arsip internal instansi)

Bagan hierarki birokrasi dan relasi kerja pada Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan dipaparkan secara visual pada Gambar 2.2. Tata kelola instansi ini berada di bawah kepemimpinan Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan selaku pemegang otoritas tertinggi yang bertanggung jawab atas perumusan kebijakan serta pengawasan operasional perhubungan daerah. Penyelenggaraan fungsi administratif harian dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas Perhubungan. Di tingkat operasional teknis pengujian, Kepala Seksi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mengemban tugas utama memimpin sertifikasi kelaikan kendaraan jalan raya. Unit ini disokong oleh Kasubag Tata Usaha yang mengoordinasikan sub-bagian operasional, meliputi loket Pendaftaran, pengelolaan arsip Tata Usaha, penerbitan Bukti Lulus Uji, administrasi nomor urut antrean (*Booking* dan Nomor Urut), pemeriksaan awal di area Pra Uji, pengujian mekanis oleh Penguji, serta didukung oleh petugas pengamanan (Satpam) dan pembantu umum (*office boy*) demi menjamin kenyamanan operasional pelayanan.